

DAFTAR PUSTAKA

- Agrif, L. T. (2017). *Transparansi Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Ilmu Pemerintahan, 4.*
- Azhar, A. (2015, 06 24). *Euforia Undang-undang Desa: Peluang atau Ancaman?* Dipetik 6 15, 2020, dari <https://www.kompasiana.com>
- Barokah, H. d. (2015:1). *Indeks Pembangunan Desa 2014.* Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Brayen, T. T. (2017). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Arangka Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Ilmu Pemerintahan, 5.*
- Desfico, Z. (2017). *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ganjuh Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan). Ilmu Pemerintahan, 5.*
- Erani, A. Y. (2015:14). *Sistem Pembangunan Desa.* Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Fitriani, R. (2018). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Implementasi Keuangan Desa, 99-100.*
- Friend, J. P. (2018). *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Nazaret Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Ilmu Pemerintahan, 2.*
- Halim, A. (2014:3). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), Kamus versi online/daring
- Katadata.co.id. (2018, Agustus 4). Dipetik April 9, 2020, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/04/berapa-anggaran-untuk-dana-desa>
- Kessa, W. (2015:48). *Perencanaan Pembangunan Desa.* Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia.
- Kompas.com. (2019, Februari 26). Dipetik Maret 30, 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun>
- Kristianten. (2006:73). *Transparansi Anggaran Pemerintah.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahyudin, N. T. (2018:28). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial Teori, Konsep, dan Rencana Proposal.* Jakarta: Salemba Empat.

- Moleong, L. (2010:11). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Dostkarya.
- Nordiawan, D. (2014: 4). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, H. (2011:2). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nusantarapostonline.com. (2019, Juli 30). *Nusantara-pos*. Dipetik Maret 28, 2020, dari <https://nusantarapostonline.com>
- Patrice, V. M. (2017). Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa). *Ilmu Pemerintahan*, 80.
- Paul, L. H. (2014:15). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Prianto, T. P. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infraskruktur Di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. *Ilmu Pemerintahan*, 4.
- Rusmianto, Y. 2018. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sakinah, N. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1.

- Selfanus, S. A. (2017). Pentingnya Transparansi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Distrik Sorong Timur Kota Sorong. *Ilmu Pemerintahan*.1
- Saraswati, S. d. (2019:4). Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP). Dalam *Mekanisme Penyusunan RKP* (hal. 4). Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Soetardjo, K. (2015:9). Tata Kelola Desa. Sumur Bandung: Graha Pustaka.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2011:162). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018
- Utomo, L. P. (2019). Evaluasi Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(1), 71-83.
- Wiharto. (2011, Maret 15). Faktor Pendorong dan Penghambat Terjadinya Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik. *Dipresentasikan Dalam Seminar Tentang Sistem Transparansi Nasional Dalam Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum*, hal. 1-22.
- Windi, L. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Ilmu Pemerintahan*, 3.
- Yabbar, R. d. (2015:120). Tata Kelola Pemerintah Desa dari Peraturan di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam *Pembangunan Desa* (hal. 120). Surabaya : Penerbit Pustaka.